

**IMPLEMENTASI PASAL 5-8 PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2000 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**MAULIDZA AULIA WULANDARI
NPM : 1621020292**

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 5-8 PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2000 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**MAULIDZA AULIA WULANDARI
NPM : 1621020292**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Pemerintah akan mengeluarkan larangan bagi truk angkutan barang melintas di beberapa ruas jalan tol maupun non tol yang melebihi muatan yang seharusnya yang sesuai di atur pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 11 Tahun 2011.

Pembatasan kendaraan truk berlaku secara nasional untuk melancarkan arus mudik. Sementara untuk truk muatan bahan pokok dan elpiji diperbolehkan beroperasi untuk memudahkan distribusi bahan pokok masuk ke Lampung. Untuk itu, Dishub Lampung bekerja sama dengan Dishub kabupaten/kota juga akan melakukan pengaturan kantong parkir bagi truk yang dilarang menggunakan jalur mudik sesuai waktu yang ditentukan, pengecualian masih diberikan untuk angkutan khusus. Yakni barang ekspor impor menuju pelabuhan, angkutan BBM dan BBG, ternak, air minum kemasan, bahan pangan pokok, angkutan uang dan pos, serta truk pengangkut motor mudik gratis. Pelarangan juga termasuk untuk mobilitas pengangkutan material untuk kepentingan proyek nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi peraturan daerah provinsi lampung tentang retribusi perizinan jalan terhadap angkutan barang muatan lebih, dan Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi retribusi perizinan jalan menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi kemudian di olah dengan tahap editing dan sistemating.

Berdasarkan hasil penelitian dari pengawasan bahwa dalam melaksanakan pengawasan truk bertonase beratdi Jalan Umum Kota Bandar Lampung Dinas Perhubungan Provinsi Lampung juga melakukan koordinasi dengan dibentuk tim terpadu yang bersifat sementara pada kegiatan penyidikan/razia kendaraan muatan khususnya diperbatasan Provinsi Lampung. Dinas Perhubungan juga melakukan pembinaan/penyuluhan berupa pengarahan terhadap pengguna kendaraan yang melakuka pengurusan izin operasional kendaraan. Sedangkan menurut Fiqh Siyasah yaitu wujud tanggung jawab Dinas Perhubungan provinsi Lampung sebagai *Tanfidziyyah Syar'iyah* yang sesungguhnya adalah kelak di hadapan Allah SWT, namun dalam kepemimpinan tanggung jawab harus selalu ada di hadapan manusia lainnya yang dipimpin dalam bentuk laporan

kegiatan. Misalnya kegiatan DISHUB menyelenggarakan pemeriksaan persyaratan teknis dan layak jalan serta pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran/surat tanda coba kendaraan dan surat ijin mengemudi, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maulidza Aulia Wulandari
NPM : 1621020292
Jurusan : *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Perspektif Fiqh Siyasah”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Juni 2021
Penyusun,



**Maulidza Aulia Wulandari
NPM. 1621020292**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Maulidza Aulia Wulandari
NPM : 1621020292
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Perspektif Fiqh Siyasah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Bandar Lampung, 22 Juni 2021
Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraimi, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.
NIP. -

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl.Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Perspektif Fiqh Siyasah”. Disusun oleh Maulidza Aulia Wulandari, NPM: 1621020292, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syar’iah UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua sidang : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.

Sekretaris : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji III : M. Yasin Al Arif, M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



**Dekan,
Fakultas Syari'ah**

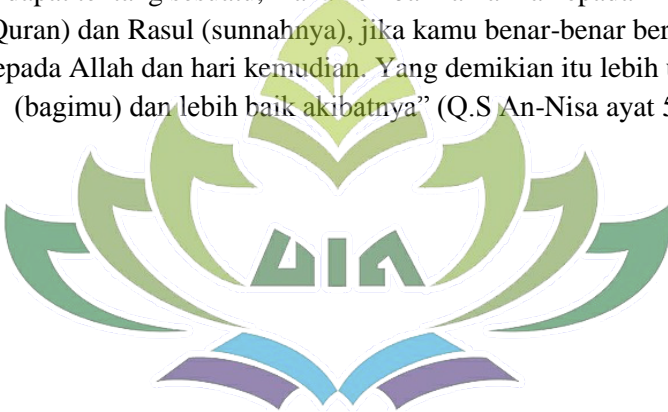
Dr. H. Khairuddin, M.H.

NPM 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-Nisa ayat 59)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudhana yang diberikan-Nya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda NAbi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

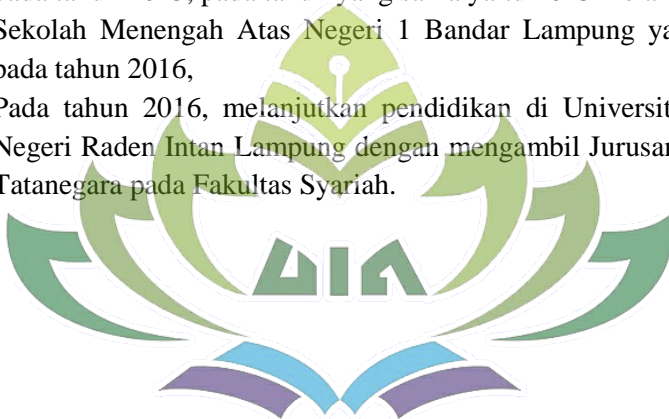
1. Ayahanda tercinta Sutopo dan Ibunda tersayang Dra. Kasma Betty, yang telah membesarkan serta senantiasa selalu mendidik, mendoakan dan memberi dukungan dengan segenap kasih sayang. Sehingga dari doa dan dukungan beliau penulis semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah ridhonya Ayah dan Ibunda.
2. Kakak-kakakku tersayang (Alm) Sukma Rifandi Yunendra, Alan Sazaly Mailaksana, S.E, dan Febtry Mariska Putri, S.Ikom., M.M yang selalu mensupport dan semangat serta penguatan mental dalam proses panjang pengerjaan skripsi, dan terimakasih selalu memberikan nasihat dan semangat selalu selama proses skripsi ini.
3. Almamterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Maulidza Aulia Wulandari, merupakan anak bungsu dari empat bersaudara yang dilahirkan pada tanggal 8 Juli 1998 di Bandar Lampung dari pasangan Ayahanda Sutopo dan Ibunda Dra. Kasma Betty.

Penulis memasuki Pendidikan dimulai dari :

1. Pendidikan bermula di TK Pratama yang selesai pada tahun 2004, kemudian melanjutkan,
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Sawah Lama yang lulus pada tahun 2010, setelah itu melanjutkan,
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2013, pada tahun yang sama yaitu 2013 melanjutkan,
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2016,
5. Pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil Jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, pejuang yang gigih, yang berusaha menyampaikan risalah ketuhanan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekuranga. Atas partisipasi berbagai pihak yang menyebabkan skripsi ini terwujud walaupun penuh dengan segala keterbatasan, oleh karena itu penulis dengan ini menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Frenki, M.si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Dr. Hj. Zuhraini, M.H dan M. Yasin Al Arif, M.H. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan saran, bimbingan dan arahan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan inatitut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Teman-teman Seperjuangan HTN terkhusus angkatan 2016 kelas E yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberikan semangat dukungan dan bantuan serta doa dalam proses skripsi ini
8. Sahabat-sahabatku Rizkita Anatayori, Dhea Vinda Fadila, Selviyana dan Ninda Hernaini yang telah memberikan semangat bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

9. Siti Aisyah Nuraini yang telah membantuku disaat penyelesaian skripsi ini dan memberiku semangat. Semoga lelah ini menjadi berkah
10. Teman-teman terbaikku, Permata Sari dan Yunita Dyah Permatasari yang selalu ada disampingku dalam keadaan apapun, memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu serta kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitiann ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu keislamana di era modern saat ini.

Bandar Lampung, 23 September 2021

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Signifikasi Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Fiqh Siyasah.....	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	19
2. Siyasah Dusturiyah.....	22
3. Retribusi dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	25
4. Pajak/Retribusi Pemasukan Negara dalam Islam.....	27
B. Retribusi	31
1. Pengertian Retribusi	31
2. Macam-macam Retribusi	35
3. Tata Cara Pemungutan Retribusi.....	36
4. Perhitungan Retribusi.....	37

C. Perizinan Jalan	38
1. Pengertian Perizinan Jalan	38
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	40
3. Prosedur Pemberian Izin	41
4. Pengawasan Izin.....	43
5. Dasar Hukum Perizinan Jalan	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	47
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	48
3. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	49
4. Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	50
5. Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	52
6. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	53
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian.....	55
1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan Jalan.....	55
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Retribusi Perizinan Jalan di Provinsi Lampung.....	57
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Retribusi Perizinan Jalan	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000	69
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Retribusi Perizinan Jalan.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Proposal ini berjudul “Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 dalam Perspektif Fiqh Siyashah”.

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan kalimat judul diatas, maka perlu penulis jelaskan uraian pengertian dari judul di atas sebagai berikut :

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹

Perda atau Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.²

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.³

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak

¹ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70

² Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h 43.

³ Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁴

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang ada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel,⁵

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁶

Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat dikenalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga sebagai hukum islam.

Siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencakup sesuatu.⁷

B. Latar Belakang

Jalan raya merupakan suatu infrastruktur transportasi darat (dalam bentuk apapun), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk

⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), h.2.

⁵ Undang-undang No 38 Tahun 2004.

⁶ Djaka, *kamus lengkap bahasa indonesia*, (Surakarta: Pustaka Mandiri 2006), h.275.

⁷ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakrta: Prenadamedia group, 2014), h 3.

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan merupakan salah satu fasilitas publik yang sangat vital bagi warga masyarakat.⁸

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.⁹

Provinsi Lampung merupakan perlintasan bagi kendaraan pribadi maupun umum untuk angkutan orang dan angkutan barang yang menuju ke Pulau Jawa atau masuk ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni. Jalan yang dilintasi yaitu Jalan Soekarno Hatta yang merupakan jalan lintas trans Sumatera. Setiap hari kendaraan-kendaraan besar yang mengangkut barang dan komoditas perekonomian lainnya melintasi wilayah Provinsi Lampung. Pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut yang banyak ditemui melintas di jalan lintas Provinsi Lampung ruas Jawa-Sumatera masih banyak penyebab kerusakan jalan meski penutupan lubang sudah berkali-kali dilakukan oleh tim pemeliharaan rutin karena lubang biasa muncul beberapa kali dalam satu bulan. Truk-truk tersebut roda belakangnya sedikit, tetapi bebannya besar sehingga daya rusaknya tinggi.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2000 yang bertujuan untuk meringankan beban pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan, maka kepada setiap orang atau badan hukum yang memperoleh manfaat dari penggunaan

⁸ Suci indrawati, *Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi di Kota Makassar*. (Skripsi Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017)

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

prasarana tersebut, khususnya kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah melalui pembayaran retribusi izin dispensasi jalan dan kompensasi atas kelebihan muatan.¹⁰

Namun, pada fakta di lapangan banyak angkutan barang yang lebih memilih tidak untuk membayar retribusi izin jalan kepada petugas yang di karenakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas kelebihan barang muatan pada angkutan yang perusahaan tersebut pakai sehingga, banyak pengemudi yang kerap tidak melewati jembatan timbang hingga pengemudi lebih memilih untuk membayar petugas yang berjaga agar dapat melewati jembatan timbang tanpa retribusi yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dan efek nya yaitu mempengaruhi kerusakan terhadap prasarana jalan yang akan dilewati apabila angkutan barang tersebut bermuatan lebih

Kondisi prasarana yang buruk menyebabkan terjadinya peningkatan biaya untuk pemeliharaan dan bahan bakar, yang pada akhirnya akan mempersempit *margin* keuntungan suatu perusahaan. Selain itu, praktik-praktik yang membahayakan dan mahal seperti angkutan barang yang melebihi muatan merupakan hal yang biasa terjadi. Akibatnya, terjadi kelebihan muatan pada angkutan barang yang sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan kerusakan jalan wilayah Provinsi Lampung yang semakin parah.¹¹

Perusahaan angkutan adalah usaha yang mengangkut barang, ternak atau penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan memakai alat angkut, baik melalui air, darat, ataupun udara dengan mendapat balas jasa. Sedangkan arti perusahaan jasa angkutan barang adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan untuk mengangkut dan mengirim barang dari satu tempat ketempat lain melalui jalur darat dengan mendapatkan balas jasa dan memakai mobil barang sesuai dengan pelayanan angkutan barang yang disediakan.¹² Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan menjelaskan bahwa jenis

¹⁰ UU No 11 Tahun 2000

¹¹ *Ibid*, h. 15

¹² <http://basarta.co.id/bisnis-jasa-angkutan-truk/>. Diakses pada hari Kamis tgl 02-07-2020, pukul 13.22 WIB.

yang digunakan jasa angkutan truk adalah jasa angkutan barang umum.¹³ Maka, dalam rangka pengamanan jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh berat kendaraan beserta muatan nya, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan lebih dari daya angkut yang ditentukan

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan melebihi daya angkut diatur dalam Pengawasan Muatan Barang Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyatakan :

- 1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi, dan kelas jalan”.
- 2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan barang”.

Sedangkan ketentuan pidana terdapat pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyatakan :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.¹⁴

Adapun juga objek dari retribusi tersebut yaitu, objek retribusi dispensasi jalan adalah kendaraan bermotor angkutan barang yang mengangkut muatan alat berat, barang khusus dan barang berbahaya serta kendaraan yang melalui kelas jalan lebih rendah sesuai ketentuan yang tertera dalam buku uji. Selanjutnya, objek retribusi kompensasi atas muatan lebih adalah kendaraan bermotor angkutan barang yang melakukan pengangkutan barang melebihi muatan dari jumlah yang

¹³ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

¹⁴ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

diizinkan (JBI) dan muatan sumbu terberat (MST) sesuai kelas jalan yang di lalui.¹⁵

Pengertian dari Fiqh Siyasah ialah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara" dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Dalam skripsi ini mencakup pembahasan pada Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.¹⁷ Sebagian dari dalil-dalil *kully* dan aturan-aturan yang dapat berubah akan dikemukakan di dalam pembahasan selanjutnya. Fiqh Siyasah Dusturiyah terdapat beberapa bidang pembahasan nya, pada bidang *siyasah tasri'iyah* termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.¹⁸

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah Dusturiyah yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.¹⁹ Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alquran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.²⁰

Dalam Al-Qur'an sendiri, sudah dijelaskan bahwa seorang karyawan atau pekerja harus menaati peraturan kebijakan yang ada di

¹⁵ Pasal 3 UU No 11 Tahun 2000

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 40.

¹⁷ *Ibid*, h. 41.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Isyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Kencana prenatal media group: Jakarta, 2009), h. 48.

¹⁹ *Ibid*, h. 41.

²⁰ *Ibid*, h. 42.

suatu daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah itu, sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S An-Nisa' 59) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اِلٰهَ وَاطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَىّ اِلٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat Al-Qur'an diatas, yang menjelaskan bahwa seorang karyawan atau pekerja juga harus menaati peraturan-peraturan yang ada pada suatu daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan pula oleh Pemerintah Pusat dan tidak boleh dilanggar agar tidak terjadi suatu perdebatan, jika seorang karyawan atau pekerja melanggar suatu peraturan daerah yang ada, maka berhak dikenakan sanksi denda atau retribusi.

Dari uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui suatu penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul : “Implementasi Perda Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan Jalan dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah menyebarkan bagaimana pelaksanaan perda provinsi lampung tentang perizinan

jalan dan retribusi kompensasi terhadap angkutan barang muatan lebih dalam perspektif fiqh siyasah.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih focus, sempuna dan mendalam maka penulis

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang retribusi perizinan jalan terhadap angkutan barang muatan lebih?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi retribusi perizinan jalan menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan dalam pelaksanaan perda Provinsi Lampung tentang perizinan jalan dan retribusi kompensasi terhadap angkutan barang muatan lebih yang kerap masih melintasi wilayah Provinsi Lampung dalam perspektif fiqh siyasah.

F. Signifikasi Penelitian

Signifikasi dari penelitian ini yang dapat diambil meliputi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Signifikasi teoritis, penelitian ini adalah untuk pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi pembaca yang mengenai sejauhmana pelaksanaan perda Provinsi Lampung di bidang angkutan barang muatan lebih tersebut menambah

pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

- b. Signifikasi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi masyarakat luas terutama untuk Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam meningkatkan pengawasan perizinan jalan dan retribusi kompensasi terhadap angkutan barang muatan lebih yang masih melewati wilayah Provinsi Lampung tanpa surat izin jalan yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat Provinsi Lampung akan penguasaan akses jalan dan penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat untuk kalangan mahasiswa Fakultas hukum di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut :

1. Hasil peneliti dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh, Irfan Pratama yang berjudul "Efektivitas Pengawasan Angkutan Barang" skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung 2017. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan mengoperasionalkan jembatan timbang dan melaksanakan pemeriksaan kendaraan angkutan barang berupa pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dan pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran/surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat ijin mengemudi. Pengawasan secara tidak langsung dilaksanakan dengan memberlakukan tertib operasional angkutan barang, yaitu pengoperasian mobil barang di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan; pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya dan pengoperasian mobil barang di jalan wajib sesuai dengan kelas jalan dan jaringan lintas yang ditetapkan.

Dari aspek manajemen pemerintahan, pengawasan angkutan barang oleh Dinas Perhubungan yang masih sangat lemah, karena tidak ada penerapan sanksi terhadap angkutan barang yang mengalami kelebihan muatan. Selain itu, sistem pengawasan tidak efektif, kewenangan disalah gunakan untuk tujuan atau kepentingan mencari keuntungan oleh oknum-oknum pejabat atau pelaksana di lapangan.²¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andalan Pelawi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya 2016. Penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memerikan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan pidana denda. Selain itu pidana tambahan dapat diberikan berupa: Pencabutan Surat Izin Mengemudi, Penggantian kerugian akibat dari pelanggaran, Penetapan pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang telah ditentukan pada Pasal 307 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pencabutan izin penyelenggaraan terhadap angkutan kendaraan bersangkutan dan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pengemudi, perusahaan angkutan umum barang dan pengurusnya. Kendala-kendala penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan melebihi daya angkut adalah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur prosedur persidangan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan ketidakseragaman peraturan setiap daerah mengenai kelas jalan dan tingkat pelanggaran daya angkut, kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas, terbatasnya biaya operasional dalam perawatan fasilitas dan sarana pendukung, faktor ekonomi

²¹Irfan Pratama, *Efektivitas Pengawasan Angkutan Barang*, skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung 2017.

masyarakat, dan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum-oknum tertentu dalam masyarakat.²²

Dari ke dua karya ilmiah tersebut di atas maka dapat disimpulkan penelitian di tegaskan bahwa pada dasarnya terjadi persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terkait pengawan dan perizinan terhadap kendaraan Pengangkutan Melebihi Daya Angkut .

Seadangkan perbedaanya bertolak dari persamaan dan perbedaan tersebut diatas maka kaitan dengan fokus masalah yang akan penulis lakukan peneliti secara objek kajian pada dasarnya sama saja yang menjadi perbedaanya, penulis melakukan penelitian di tempat yang berbeda fokus penelitian dan permasalahannya juga berbeda

H. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan peneltian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²³ Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis dan lebih pada penelitian secara mendalam untuk hasil yang lebih akurat serta akan lebih banyak uraian atau informasi yang bias diperoleh sehingga pertanyaan dalam penelitian ini dapat terjawab sesuai dengan apa adanya yang terjadi di lapangan. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan

²²Andalan Pelawi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya 2016.

²³Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2013), h. 6

metode yang mampu menghantarkan mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :²⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial : individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁵

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²⁶ Pada penelitian ini, penulis menggambarkan dengan lebih rinci dan melakukan analisis mengenai implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2000 tentang retribusi perizinan jalan dalam perspektif fiqh siyasah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menghasilkan beberapa sumber yang akurat untuk suatu penulisan karya ilmiah, maka data tersebut didapatkan dengan tiga sumber, yaitu :

- a. ensiklopedia Sumber Data Primer, merupakan sumber data pokok dalam penelitian skripsi ini. Adapun sumber data primer atau pokok dari penelitian skripsi ini ialah hasil wawancara langsung dari lokasi penelitian, yaitu informasi mengenai Pasal 5 Peraturan

²⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005),h.31

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (jakarta: Raja Grafindo Persada: 2011),h.80.

²⁶ *Ibid.* h, 75.

Daerah Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2000 di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

- b. Sumber Data Sekunder, merupakan bahan hukum yang berisikan informasi yang menjelaskan, membahas dan mendeskripsikan bahan hukum sekunder atau sumber data sekunder seperti buku artikel terkait jurnal. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah berkaitan dengan Al-Qur'an, buku-buku, artikel, jurnal-jurnal, berita di media sosial dan media cetak, maupun skripsi-skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Sumber Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang petunjuk dan penjelasan data primer dan sekunder berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, surat kabar, majalah, kamus, dan lainnya yang dapat membantu data pada penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan cara wawancara (interview), merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan data secara lisan guna mencapai tujuan yang berbagai macam salah satunya, yaitu diagnosa dan tritment yang biasa dilakukan oleh ilmuwan atau dokter untuk keperluan untuk mendapat berita atau hasil seperti yang sering dilakukan oleh wartawan untuk melakukan penelitian, dan lain-lainnya.²⁷ Hal ini ditunjukkan kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung bagian Angkutan Barang.
 - b. Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan cara observasi. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (*proton*

²⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 95.

dan elektron) maupun yang sangat jauh (*benda ruang angkasa*) dapat diobservasi dengan jelas.²⁸

- c. Pengumpulan Data Tersier dilakukan dengan cara melalui dokumen, metode pengumpulan data ini yang umum digunakan penelitian sosial adalah pemeriksaan dokumen. Data dokumen bisa berupa literature, buku harian, majalah, notulensi rapat, korpus audio, video, foto, dan lain sebagainya. Proses pengumpulan dokumen dilakukan karena peneliti memiliki argumentasi yang kuat bahwa data penting terpat pada dokumen tertentu.²⁹

4. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁰ Populasi dalam penelitian ini adaah staff di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung memiliki jumlah sebanyak 50 staff
2. Sampel adalah sebaaian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil setengah dari jumlah populasi, selanjutnya jika jumlah subjek lebih besar atau lebih dari 100 dapat diambil antara 5-10% atau 20-25% ataupun lebih. Melihat jumlah dari populasi staff Dinas Pehubungan yang sebanyak 50 maka ditetapkan jumlah sample sebesar 10%, yaitu staff Dinas Perhubungan berjumlah $25 \times 10\% = 2$.³¹

Berdasarkan kriteria tersebut penulis melihat beberapa pihak yang relevan dan dapat dijadikan sampel serta memiliki kesesuaian dengan kriteria-kriteria penetapan sampel penelitian sebagaimana

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA CV, 2012),h. 403.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2011), h 80.

³¹ *Ibid.*, h 80

dijabarkan di atas, adapun sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

5. Metode Pengumpulan Data

1. *Editing* adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatatn-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya
2. *Coding* adalah proses untuk mengklarifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria dan macam yang ditetapkan³²
3. *Sitematizing* adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah³³. Pada penelitian ini penulis melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan yang telah diperoleh secara sistematis, tersusun, beraturan sesuai klasifikasi data yang diperoleh.

6. Metode Analisis Data

Menurut Nasution, analisa data adalah proses menyusun, mengkatagorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami makna nya.³⁴ Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian (*research*). Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa berdasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan analisis tersebut.

Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan dengan analisis data.³⁵ Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan data melalui proses editing, yaitu peneliti memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi.

³² Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 1998),h.129-130.

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.12

³⁴ Soeranto Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h. 391.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, , h. 68..

Kemudian proses melakukan analisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa, yakni metode deduktif. Metode deduktif adalah “suatu metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus”.³⁶ Metode deduktif digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan terkait batasan sikap yang berdasarkan pada akidah dalam pandangan fiqh siyasah tentang implementasi pasal 5-8 peraturan daerah nomor 11 tahun 2000.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini penulis menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran tentang materi yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*. Kemudian dalam bab ini juga memuat penegasan judul, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi pengertian pemilihan umum, tata cara pemilu di Indonesia, hak pilih dan permasalahannya, hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam pemilu, serta demokrasi dalam Islam dan penjelasan yang berkaitan dengan skripsi.

3. Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan pendeskripsian objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian.

³⁶ Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>. Diakses hari Kamis tgl 09-07-2020, pukul 12.28 WIB

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang beberapa kajian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yang menjelaskan tentang Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung).

5. Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung).



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Berbeda dengan ilmu yang sudah bersifat pasti (*qadh'i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsil*).³⁷

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya (*ibadah*), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).³⁸ Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih terperinci.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh

³⁷Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.2-3.

³⁸*Ibid*, hlm.3.

siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminologi konsep *fiqh siyasah* tersebut.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya ‘mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan lainnya.³⁹

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'ruf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.⁴⁰

Dengan demikian pengertian *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Mujar Ibn Syarif dalam bukunya “*Fiqh Siyasah*” mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *fiqh siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata Negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata social Islam.⁴¹

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *Fiqh Siyasah*, maka dalam tahap perkembangannya dikenal beberapa bidang *Fiqh Siyasah*.

³⁹Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.25-26.

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)h.4.

⁴¹Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.9

Hasbi Ash Shiddieqy sebagai contoh yang membaginya dalam delapan bidang yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah*
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah*
6. *Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*
7. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*⁴²

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* disebut juga dengan politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga dengan politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan, (*siyasahharbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. *Siyasah Maliyyah*, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴³

⁴²Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin....*, h.10.

⁴³Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),. h.15.

2. *Siyasah Dusturiyah*

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemukaagama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.⁴⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah ini biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.⁴⁵

A. Jazali mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di

⁴⁴Ibid, h.177-178.

⁴⁵A. Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.47.

dalamnya. Karena terlalu luas, kemuadian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A. Jazali mempetakan bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajiban, 2) rakyat, hak dan kewajiban, 3) bai'at, 4) *waliyu al'ahdi*, 5) perwakilan, 6) *ahlul halli wa al-aqdi*, 7) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidangkajian *Siyasah Dusturiyyah* meliputi: 1) konstitusi, 2) legislasi, 3) ummah, 4) *shura* atau demokrasi.⁴⁶

Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep Negara Islam, oleh Abdul Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁷

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punyihak, melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lainnya.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-

⁴⁶Imam Amrusi Jalani, *Hukun Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h.25-27.

⁴⁷*Ibid*, h.29

perkaraawam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT.

Adapun *Wilayah al-Mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.⁴⁸ *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tertinggi sampai pejabat paling rendah. Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan *Wilayah al-Mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.⁴⁹

⁴⁸Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.113.

⁴⁹*Ibid*, h.114.

3. Retribusi Perizinan dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*

Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah merupakan salah satu ruang lingkup fiqh siyasah yang di dalamnya membahas persoalan *imamah*,⁵⁰ persoalan *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahadi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dalam ketatanegaraan yang mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yaitu: 'tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti maslahat'.⁵¹ Dalam surat Ali- Imran ayat 104 Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: 'Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung' (QS. Ali-Imran: 104).⁵²

Berdasarkan al-qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara

⁵⁰Ibnu Syarif, Mugar, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 16.

⁵¹Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h.178.

⁵²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris Terjemah Dua Muka*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), h. 63.

dengan syarat bahwa pemimpin ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *al- sulthan tanfidziyyah*⁵³ adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Sementara masyarakat wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut. Sebagaimana hadits Nabi berikut:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: *‘Barangsiapa yang mentaatiku maka sungguh ia telah taat kepada Allah, dan barangsiapa yang durhaka kepadaku maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah. Dan barangsiapa yang taat kepada amirku maka sungguh ia telah taat kepadaku, barangsiapa yang durhaka kepada amir-ku maka sungguh ia telah durhaka kepadaku’*.⁵⁴

Dalam hal retribusi perizinan angkutan muatan lebih oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang berperan sebagai *Tanfidziyyah Syar’iyyah* yaitu pelaksana dari Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan Jalan terkait Pengawasan, pemeriksaan persyaratan teknis dan layak jalan. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung bertanggung jawab dalam implementasi perda tersebut. Oleh karena itu melalui program kerjanya, Dinas Perubungan Provinsi Lampung dianjurkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan demi mewujudkan tujuan dibentuknya perda tersebut. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada.

⁵³Ibnu Syarif, Mugar, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam...*, h. 16.

⁵⁴Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* Juz. IV..., h. 327.

Setiap orang yang hidup di atas dunia ini, memiliki tanggung jawab pemimpin dalam dirinya masing-masing sesuai lingkup kekuasaannya, apapun posisi dan perannya. Sebagaimana hadits nabi berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: ‘Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: ‘Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya, penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya.’⁵⁵

Wujud tanggung jawab Dinas Perhubungan provinsi Lampung sebagai *Tanfidziyyah Syar’iyyah* yang sesungguhnya adalah kelak di hadapan Allah swt, namun dalam kepemimpinan tanggung jawab harus selalu ada di hadapan manusia lainnya yang dipimpin dalam bentuk laporan kegiatan. Misalnya kegiatan DISHUB menyelenggarakan pemeriksaan persyaratan teknis dan layak jalan serta pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran/surat tanda coba kendaraan dan surat ijin mengemudi, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya *operasional* pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan. Dari kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya dari DISHUB dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

4. Pajak/Retribusi pemasukan negara dalam Islam

Dalam pemerintahan Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah Saw. Hingga zaman pertengahan. Pada zaman Rasulullah Saw. Dan para sahabat baitul mall adalah lembaga pengelolaan keuangan negara sehingga terdapat sehingga terdapat kebijakan fiskal seperti yang kita kenal saat ini. Dalam sistem ekonomi konvensional (non Islam), kita mengenal adanya istilah pajak

⁵⁵Muslim, Shahih Muslim, Juz II hadits no 4828, (Lebanon: Dar Al Kutub Beirut, t.t), h. 125.

(tax) yaitu sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain.

Pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari dharibah sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian dharibah diartikan dengan pajak (muslim). Dharibah adalah pajak tambahan dalam islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (tax) menurut teori ekonomi non-Islam.⁵⁶

Pada masa-masa pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau tahun 1 Hijriah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada fase awal ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah. Situasi mulai berubah, setelah turunnya surat Al-Anfal (Rampasan Perang). Pada waktu perang badar di tahun 2 hijriah, sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang (ghanimah) yang disebut dengan khumz (seperlima), berupa kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan.⁵⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ جَزَىٰ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: “ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu

⁵⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta, : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.29

⁵⁷Mustafa Edwin Nasution, *Budi setyanto dan Nurul huda, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* , (Jakarta: kencana,2007), h.205.

sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Qs. Al-Anfal ayat 41).

Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat jizyah, yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya.

Jenis pendapatan negara dalam sistem Ekonomi Islam

No.	Nama pendapatan	Jenis Pendapatan	Subyek	Obyek	Tarif	Tujuan Pengguna an
1	Ghanimah	Tidak Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 klmpok
2	Zakat	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 kelompok
3	‘Ushr- shadaqa	Tidak Resmi	Muslim	Hasil pertanian / dagang	Tetap	8 kelompok
4	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak tetap	Umum
5	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Sewa tanah	Tidak tetap	Umum
6	‘ushr-cukai	Resmi	Non Muslim	Barang Dagang	Tidak tetap	Umum
7	Waqaf	Tidak resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum
8	Pajak (dharibah)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum

Pajak (Dharibah) adalah pajak tambahan dalam islam, yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (tax) menurut teori ekonomi non-

Islam.⁵⁸

Pada hakikatnya, tugas manusia dimuka bumi ada dua, yaitu mengabdikan (ibadah) dan merawat kemakmuran bumi. Demi suksesnya tugas yang pertama, ia harus berbekal IMTAQ, sedangkan untuk kesuksesan tugas yang kedua harus berbekal IPTEK. Manusia dengan potensi yang dimilikinya tetap dipilih oleh Allah menjadi makhluk terhormat sekaligus mendapat mandat untuk menjadi wakil Tuhan (khalifatullah) di muka bumi. Mandat kekhalifahan ini digambarkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab (33) ayat 72 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”. (Qs. Al-Ahzab ayat 72).

Tugas kekhalifahan itu tidak dilepas begitu saja tanpa diberikan kewenangan untuk mengelola bumi dan seisinya. Ini berarti, untuk kelancaran tugas tersebut, Allah telah menyiapkan sarana dan prasarana yang lengkap untuk segala profesi. Sebagai imbangannya, tugas kekhalifahan bukan tugas gratis tanpa pertanggungjawaban. Karena itu, tugas ini merupakan tugas yang berkelanjutan dan berkesinambungan; mulai dari menata, merawat memanfaatkan, dan melestarikan. Keseluruhan tugas yang

⁵⁸Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.30.

berkelanjutan dan berkesinambungan tersebut diarahkan untuk kemaslahatan umat.⁵⁹

Dalam kenyataannya kehidupan dalam masyarakat muslim masih banyak bertolak belakang dengan pesan Al-Qur'an. Pesan yang menuntut bahwa hendaknya harus ada orang yang menggerakkan masyarakat agar lebih partisipatif dalam pembenahan masalah-masalah tersebut. Agama dalam konteks ini harus bisa memobilisasi kesadaran umat sehingga gagasan (dalam wahyu) menjadi realita (dibumi). Dengan kata lain, energi potensial bisa berubah menjadi cahaya pemberi terang, penuntun jalan kesejahteraan. Manusia berposisi sebagai khalifah tuhan di bumi dan karena amanat itu, tugas-tugas harus dilaksanakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Allah meminta agar semua kegiatan manusia dilakukan dengan baik, tidak berlebih-lebihan, dan tanpa menzalimi orang lain. Dari keseluruhan uraian diatas, dapat ditarik rumusan sederhana bahwa tugas kekhalifahan adalah amanat yang bermakna mengatur perintah Allah dan melaksanakannya secara baik dan profesional, demi kemaslahatan umat dan pada saat yang sama juga bermakna tugas untuk mengelola larangan-larangan-Nya yang sekecil apapun untuk dihindari sehingga kemudharatan umat dan kerusakan di bumi dapat dihindari sedini mungkin.⁶⁰

B. Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Retribusi merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari apabila tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik.

Menurut Munawir, Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi juga dapat di artikan sebagai pungutan

⁵⁹ Aziz Fahrurrozi & Erta Mahyudin, *Fiqh Manajerial*, Al-Mawardi, (Jakarta Selatan: Grmedia, 2010), h. 7.

⁶⁰ *Ibid*, h.6.

yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi/ pelayanan yang diberikan pemda yang langsung dikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya, didasarkan atas peraturan yang berlaku.⁶¹

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶²

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa dimaksud. Menurut Harits dapat terlihat sifat-sifat retribusi sebagai berikut.⁶³

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis
2. Ada imbalan langsung kepada pembayar
3. Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk pembayaran
4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol
5. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Berdasarkan sifatnya, retribusi dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu:

⁶¹Damas Dwi Anggoro, *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Malang: Ub Press 2017), h. 12.

⁶²Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah

⁶³Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.5.

1. Sifat pemungutannya

Di lihat dari sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

2. Sifat pelaksanaan

Pemungutan retribusi yang berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin sedangkan retribusi hanya dapat di pungut oleh pemerintah daerah .

Sumber penerimaan daerah yang dapat di andalkan selain dari pajak daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk dapat meningkatkan penerimaan asli daerah adalah dengan memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Lutfi, ada dua cara yang dapat di lakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang bersal dari pajak daerah dan retribusi daerah yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daeah berdampak terhadap terciptanya kemandirian fiskal daerah sehingga pemerintah daerah mampu membiaya pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk tujuan pembangunan.⁶⁴

Dalam pemungutan retribusi daerah terdapat beberapa istilah/terminologi yang umum digunakan, penerapan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebabkan adanya penambahan dan beberapa perubahan dalam istilah pajak daerah. Istilah-istilah yang digunakan dalam retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

⁶⁴Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), h.54.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten/walikota bagi Daerah Kota.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama kepala daerah.
8. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi Pengertian retribusi daerah dikemukakan oleh Mardiyasm bahwa retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.⁶⁵

2. Macam-Macam Retribusi

Dalam undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi dikelompokkan atas tiga bagian yaitu:

a. Retribusi jasa umum

Peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 mengatur bahwa jasa umum merupakan retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk jasa yang berhubungan dengan tugas umum pemerintah dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.

⁶⁵Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Ciptaguna. 2004), h.63.

c. Retribusi perijinan tertentu

Pada retribusi perijinan tertentu, mengikat fungsi perijinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian ijin pada pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi.⁶⁶

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b) Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

3. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 1997 Pasal 26 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat sensitif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.⁶⁷ Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi,

⁶⁶ Adhi, *Analisis Pengaruh Retribusi Parkir Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah* (Kota Bandar Lampung : PAD, 2012), h. 17.

⁶⁷ TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), h.34.

dan penagihan retribusi Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemugutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Undang-undang No 28 Tahun 2009 Pasal 161 menetapkan bahwa pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.⁶⁸

4. Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tariff retribusi dan tingkat penggunaa jasa.

Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan

⁶⁸Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi jasa umum, tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2) Tarif retribusi jasa usaha, tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- 3) Tarif retribusi perizinan tertentu, tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perizinan tersebut.

C. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah

laku para warga.⁶⁹ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:⁷⁰

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:⁷¹

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionario* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

⁶⁹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), h.2.

⁷⁰*Ibid.*, h.2-3.

⁷¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h.17-18.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Secara umum fungsi dan tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Fungsi Dan Tujuan Pemberian Izin:

a. Fungsi Perizinan

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷² Norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Wujud dari ketetapan ini salah satunya adalah Izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was* (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Izin merupakan ketetapan, dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, yaitu : (1) persyaratan, hak dan kewajiban, (3) tata cara (prosedur), (4) jangka waktu berlaku, (5) waktu pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan (8) sanksi.⁷³

b. Tujuan Perizinan

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:⁷⁴

a) Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

⁷²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.196-197.

⁷³Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.197.

⁷⁴Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan ...*, h.200.

- 1) Untuk melaksanakan peraturan. Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
- b) Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

3. Prosedur Pemberian Izin

Prosedur Pemberian Izin adalah sebagai berikut:

a. Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.⁷⁵ Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan

⁷⁵Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan...*, h. 190.

deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai: sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

b. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.⁷⁶

- 1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

c. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

d. Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari

⁷⁶*Ibid.*, h. 187.

pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Mengikuti standar nasional.
- 3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- 4) Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*.
- 5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

4. Pengawasan Izin

Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara. Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.⁷⁷

Menurut Sujamto tujuan pengawasan adalah:⁷⁸

- a. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.
- b. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi Negara.

Sementara itu kegunaan dari pengawasan adalah:⁷⁹

- a. Untuk mendukung penegakkan hukum
- b. Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakkan peraturan perundangan
- c. Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran(bujukan), peringatan dan nasehat.

⁷⁷S.Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia, 1994), h.84.

⁷⁸Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 201.

⁷⁹*Ibid.*, h.202.

5. Dasar Hukum Perizinan Jalan

Permohonan izin diajukan melalui Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. Mengenai perizinan jalan:

Untuk masalah Perizinan, kita merujuk pada Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ:

‘Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.’

Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait.⁸⁰

Sedangkan Izin penyelenggaraan angkutan alat berat, diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸¹

Perlu diketahui bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang harus berbentuk badan hukum Indonesia, yakni antara lain berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perseroan terbatas (PT), atau koperasi.⁸²

Untuk prosedur perizinan itu sendiri berdasarkan informasi yang kami dapat dalam laman Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dijelaskan mengenai alur prosedur pemberian izin bagi penyelenggaraan Angkutan barang khusus, dimana antara lain permohonan tersebut diajukan melalui Dirjen

⁸⁰Pasal 180 ayat (1) UU LLAJ

⁸¹Pasal 180 ayat (2) UU LLAJ

⁸²Pasal 79 PP No. 74/2014

Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, kemudian akan dilakukan verifikasi awal dan cek berkas persyaratan yang meliputi:⁸³

1. Surat Permohonan.
2. Rekomendasi Instansi Terkait:
 - a. Barang Berbahaya dan Limbah Barang Berbahaya dari Kementerian Lingkungan Hidup.
 - b. Minyak dan Gas (BBM, BBG, CNG, LGV dll.) dari Kementerian ESDM.
3. Akte Pendirian Perusahaan.
4. Fotokopi STNK & Buku Uji Kendaraan.
5. Foto Kendaraan (semua sisi).
6. Surat Keterangan tentang nama, jenis dan jumlah barang berbahaya yang akan diangkut (MSDS / *Material Safety Data Sheet*).
7. Prosedur penanggulangan keadaan darurat (*Emergency Response*).
8. Identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan.
9. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus KPS Hilang).

Berdasarkan Angka 1 Poin C Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan terkait Ijin Penyelenggaraan Angkutan Khusus dan Alat Berat:⁸⁴

1. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus, izin per 5 tahun, tarif Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Izin penyelenggaraan angkutan alat berat, izin per 5 tahun, tarif Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

⁸³Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Tersedia Online : <http://hubdat.dephub.go.id>. Diakses pada tanggal 15 September 2020.

⁸⁴Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:⁸⁵

- a) Perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar;
- b) Penyusunan kebijakan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional dan jalan provinsi;
- c) Penetapan lokasi, pengesahan rancang bangun dan persetujuan pengoperasian terminal penumpang type b;
- d) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanan dalam satu provinsi;
- e) Penetapan tarif penumpang antar kabupaten/kota dan tarif angkutan penyebarangan kelas ekonomi pada lintas penyebarangan yang terletak pada jaringan provinsi;
- f) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan

⁸⁵Dokumen Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020

pengamanan pemakai jalan serta fasilitasi pendukung di jalan provinsi;

- g) Pengoperasian dan penimbangan unit penimbangan kendaraan bermotor;
- h) Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota;
- i) Penyelenggaraan, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara serta jembatan timbang;
- j) Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian;
- k) Pelayanan administratif.

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu Dinas. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan Dinas selanjutnya. Kehidupan Dinas sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi Dinas juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Adapun Visi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung adalah: “Penyelenggara Sistem Transportasi Yang Berkualitas” Arti Visi tersebut adalah terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, aman, nyaman, tertib dan teratur melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pembangunan Provinsi Lampung yang maju dan modern.⁸⁶

⁸⁶Dokumen Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan Dinas dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, telah disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program Dinas ingin dicapai. Misi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung adalah:⁸⁷

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
3. Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi.
5. Mengoptimalkan dan meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi.

3. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai implementasi dari misi dinas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sub Sektor Perhubungan maupun diklat dan pelatihan lainnya.
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi.

⁸⁷ Dokumen Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020

3. Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan (orang dan barang).
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait dengan Program Perencanaan Pusat dan Daerah dalam sektor transportasi.
5. Menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah ada maupun potensi Pendapatan yang belum dapat dimaksimalkan dari Sektor Transportasi.

Sasaran Dinas Perhubungan sebagai implementasi dari misi dan tujuan dinas adalah sebagai berikut:⁸⁸

1. Tersedia pegawai yang memiliki pengetahuan, wawasan dan kemampuan teknis di bidang transportasi.
2. Tersedia pegawai yang mampu mengembangkan potensi diri yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas pekerjaan.
3. Tersedianya sarana transportasi yang aman, nyaman, terpadu dan terjangkau oleh masyarakat.
4. Tersedianya prasarana transportasi yang lengkap serta dapat menunjang keselamatan transportasi.
5. Terlaksananya pelayanan jasa transportasi yang aman, selamat, nyaman, lancar, tertib dan teratur, ramah lingkungan, efektif dan efisien.
6. Terkoordinasikannya peraturan dan rencana mekanisme kerja instansi yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi.
7. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor transportasi.

4. Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian

⁸⁸Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020

tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/ kelemahan dan peluang/ ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparatur Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan Sub Sektor Perhubungan maupun pendidikan dan pelatihan lainnya.
- 2) Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang melalui penyediaan prasarana transportasi yang aman, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien dan terjangkau.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan), maupun Daerah guna menciptakan sinergitas cara kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Meningkatkan produktifitas ekonomi melalui penyediaan dan transportasi yang menunjang dan dapat menggerakkan interaksi ekonomi masyarakat secara terpadu, tertib, lancar dan efisien.
- 5) Menunjang mobilitas masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan penyediaan sarana perhubungan untuk segenap lapisan masyarakat.
- 6) Memelihara dan mempertahankan kwalitas lingkungan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi.
- 7) Memantapkan ketersediaan dan sumber pembiayaan kebutuhan penyediaan jasa dan pembangunan prasarana transportasi.
- 8) Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi.

⁸⁹Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020

5. Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan ketetapan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi Dinas. Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai berikut:⁹⁰

1) Kebijakan Internal

- a. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- b. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan (*Level of Service*), kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan.
- c. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas.
- d. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu dibangun prasarana terminal yang representatif.
- e. Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diadakan fasilitas parkir umum, dengan diadakannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir tersebut.
- f. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik

⁹⁰Dokumen Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020

jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- g. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan.
- h. Perlu dilibatkannya Personil Dinas Perhubungan dalam membantu pengendalian guna menunjang kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.
- i. Untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan

2) Kebijakan Eksternal

- a. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya transportasi.
- b. Pembinaan terhadap pemilik/ pengusaha angkutan yang berdomisili didalam Provinsi Lampung.
- c. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi.
- d. Pembangunan lanjutan terminal type A Rajabasa.

6. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai Unsur Pelaksana Teknis di bidang Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada WaliProvinsi Lampung. Adapun Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:⁹¹

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

⁹¹Dokumen Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020

- b) Sub Bagian Keuangan.
- 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
- 3) Bidang Perhubungan Darat, membawahi:
 - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - a) Seksi Angkutan;
 - b) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
- 4) Bidang Perkeretaapian, membawahi:
 - a) Seksi Lalu Lintas Perkeretaapian;
 - b) Seksi Angkutan Perkeretaapian;
 - c) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.
- 5) Bidang Perhubungan Laut, membawahi:
 - a) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - b) Seksi Kepelabuhan;
 - c) Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan.
- 6) Bidang Perhubungan Udara, membawahi:
 - a) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Udara;
 - b) Seksi Keselamatan Penerbangan;
 - c) Seksi Teknis Bandar Udara.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.⁹²

⁹²Dokumen Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020

B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan Jalan

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah⁹³ berkaitan dengan pengawasan angkutan muatan lebih adalah dengan secara langsung dilakukan mengoperasionalkan dan melaksanakan pemeriksaan kendaraan angkutan muatan lebih berupa pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dan pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran/surat tanda coba kendaraan dan surat ijin mengemudi, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya *operasional* pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan. Atas dasar hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung membentuk Peraturan Pemerintah Daerah Lampung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan Jalan.⁹⁴

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan retribusi salah satunya mengenai, Retribusi Perizinan Jalan, yaitu pembayaran atas pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam konteks yang demikian maka Dinas Perhubungan Provinsi Lampung melaksanakan pengawasan terhadap angkutan barang tersebut, sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

⁹³Pasal 1 (Ayat 2), Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁹⁴Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan Jalan

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini juga diatur tentang retribusi perizinan jalan diantaranya adalah Objek Retribusi, terdapat pada pasal 3:⁹⁵

- 1) Objek retribusi dispensasi jalan adalah kendaraan bermotor angkutan barang yang mengangkut muatan alat berat, barang khusus dan barang berbahaya serta kendaraan yang melalui kelas jalan lebih rendah sesuai ketentuan yang tertera dalam buku uji.
- 2) Objek retribusi kompensasi atas muatan lebih adalah kendaraan bermotor angkutan barang yang melakukan pengangkutan barang melebihi muatan dari jumlah yang diizinkan (JBI) dan/atau muatan sumbu terberat (MST) sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.

Peraturan ini dapat berjalan dengan baik jika masyarakat juga berperan aktif dalam masalah pengawasan retribusi perizinan jalan ini. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung juga menetapkan kewajiban bagi masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam mengikuti pengawasan perizinan jalan. Bentuk dan isi surat izin serta tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin ditetapkan dengan Keputusan⁹⁶, yaitu:

- (a) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan

⁹⁵Pasal 3, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan Jalan.

⁹⁶Pasal 6, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan Jalan.

kewajiban melakukan daftar ulang pada setiap tahun;

- (b) Apabila masa berlaku izin dimaksud ayat (1) Pasal ini berakhir, dapat dilakukan perpanjangan.
- (c) Tata cara pendaftaran ulang dan perpanjangan izin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.⁹⁷

Dalam Perda ini ketentuan besaran tarif retribusi perizinan jalan yaitu pada Pasal 8:⁹⁸

1. Struktur tarif dasar retribusi digolongkan berdasarkan volume dan jenis barang.
 2. Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Semen sebesar Rp. 2.500,-/ton;
 - b. Batubara sebesar Rp. 10.000,-/ton.
 3. Jenis mineral lainnya, besarnya tarif retribusi dan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.
- 2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan Jalan di Provinsi Lampung**

Kewajiban penggunaan jalan umum bagi kendaraan barang, meliputi melakukan penimbangan dan pemeriksaan beban muatan secara internal, memasang perangkat lunak yang memuat seluruh data kendaraan yang disediakan oleh pemerintah, memasang dan menutup terpal atau bahan lainnya pada bagian atas muatan, melakukan pencucian dan atau memastikan bahwa roda atau ban kendaraan terbebas dari kotoran tanah liat atau lumpur atau partikel lain, melakukan pembersihan jalan umum yang dilalui akibat kelalaian dari tata cara pengangkutan/ pengemasan muatan, mematuhi ketentuan jumlah berat yang diizinkan sesuai dengan Muatan

⁹⁷Pasal 7, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan Jalan

⁹⁸Pasal 8, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan Jalan.

spesifikasi kendaraan (Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000).

Dari hasil penelitian, ada dampak jika angkutan barang muatan lebih melewati jalan-jalan umum provinsi, untuk itu Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terus berupaya melakukan pengawasan terhadap angkutan barang yang masuk di wilayah kota Bandar Lampung. Sebagaimana yang disampaikan Staff Seksi Angkutan Barang, sebagai berikut

"Dampak nyata yang ditimbulkan oleh muatan berlebih (*overloading*) atau kendaraan truk bertonase berat adalah kerusakan jalan sebelum periode/ umur teknis rencana tercapai, dimana jalan merupakan sarana untuk publik jika kerusakan jalan memperpendek umur jalan, maka dibutuhkan dana untuk memperbaiki kembali jalan yang rusak. Kalau kerusakan itu tidak terjadi, anggaran dana tersebut bisa digunakan oleh pemerintah untuk membangun jalan di daerah terisolir."⁹⁹

Pengawasan jalan umum bagi kendaraan angkutan barang oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dengan melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan/kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau pengguna atau pemegang izin jalan umum, pembinaan berupa pemberian penyuluhan mengenai peraturan daerah ini.¹⁰⁰ Upaya pengawasan yang dilakukan oleh kepala Dinas Perhubungan atau dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu melaksanakan tugas pengawasannya meliputi:¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara dengan Viky Amalia Staff Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Pada Tanggal 02 Maret 2021.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Viiky Amalia Staff Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Pada Tanggal 02 Maret 2021.

¹⁰¹ Wawancara dengan Viky Amalia Staff Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Pada Tanggal 02 Maret 2021.

- a) Pemantauan dan evaluasi ketaatan persyaratan dan kewajiban izin.
- b) Menyediakan pos pengawas, serta sarana pengawas lainnya.
- c) Menjamin keterbukaan informasi dan pengawasan berwawasan informasi teknologi ini secara berkesinambungan dan dapat diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat melalui situs yang disiarkan secara waktu nyata dan terkini.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung diterapkan melalui sistem pengawasan sesuai yang didasarkan pada peraturan daerah Provinsi Lampung tersebut dengan mekanisme atau standar operasional prosedur pengawasan meliputi:¹⁰²

- 1) Melakukan pemantauan (pos pengawasan) pada setiap pintu masuk Kota Bandar Lampung.
- 2) Memeriksa pemegang izin/pemilik kendaraan muatan barang harus memenuhi kewajiban/ketaatan pengguna jalan umum untuk kendaraan muatan barang.
- 3) Melakukan penimbangan, pelanggaran muatan dikenakan sanksi berupa pembongkaran muatan. (Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan).

Pengaturan penggunaan jalan, yaitu:

- 1) Setiap kendaraan bermotor angkutan baik angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, hasil kehutanan dan lain-lain diperbolehkan diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan tidak melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan yang sudah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku.

¹⁰²Wawancara dengan Viky Amalaia Staff Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Pada Tanggal 02 Maret 2021.

- 2) Apabila terdapat kendaraan bermotor angkutan yang bebannya melebihi Muatan Sumbu Terberat yang diizinkan, pihak pengangkut wajib membongkar kelebihan beban tersebut pada tempat yang telah ditentukan.
- 3) Pemerintah Daerah wajib membuat tempat penampungan pembongkaran kelebihan muatan kendaraan angkutan disetiap jembatan timbang yang berada dalam wilayahnya.
- 4) Dalam hal pembongkaran kelebihan muatan kendaraan bermotor angkutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka dikenakan retribusi.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pengawasan didahului melalui tindakan preventif berupa, sosialisasi baik melalui media cetak, pamflet dan himbauan kepada para pengusaha angkutan barang secara berkelanjutan tentang kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan jalan bagi kendaraan barang/muatan bertonase. Ibu Viki mengungkapkan bahwa:

“Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan Jalan cukup mengatur mengenai retribusi perizinan jalan. Bentuk sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 18, Perda No. 11 Tahun 2000 berupa; surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali, dan paksaan dalam bentuk perintah menghentikan kendaraan yang diindikasikan melanggar sebelum masuk jalan umum, perintah memperbaiki prasarana dan prasarana umum dari akibat pelanggaran yang dilakukan bahkan dapat berupa penghentian sementara operasional angkutan di jalan umum, penangguhan izin, serta pencabutan izin.”¹⁰³

Guna menciptakan mutu jaringan pelayanan jalan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan

¹⁰³ Wawancara dengan Staff Angkutan Barang (Anonim) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Pada Tanggal 02 Maret 2021.

kelancaran, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna lalu lintas di jalan umum, maka dilakukan rute khusus jalan umum bagi angkutan kendaraan bertonase berat (truk) atau kendaraan angkutan barang dengan muatan 5 tonase keatas. Seperti yang diungkapkan oleh Staff Seksi Angkutan Barang :

“Untuk pengawasan dan pengendalian lalu lintas juga diberlakukan lintasan kendaraan muatan diatas 5 tonase/ truk besar boleh melalui lintasan jalan umum tersebut (hanya boleh dilewati pukul 21.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB) pada jalan lintas Provinsi Lampung. Pelanggaran muatan melebihi kapasitas kendaran dengan kapasitas jalan atau lintasan jalan umum di Provinsi Lampung berdasarkan observasi penelitian hampir setiap hari terjadinya penyalahgunaan jalan, terutama pada waktu sore hari dengan lintasan yang tidak dilewati kendaraan muatan (maksimal 5 tonase), dan lintasan jalan tersebut dilalui oleh kendaraan muatan besar (truk roda 10 dan lebih).”¹⁰⁴

Berikut pelanggaran lalu lintas angkutan barang truk bertonase berat di jalan umum di Provinsi Lampung.

Tabel 3.1

Daftar Pelanggaran Truk Bertonase Berat Tahun 2019-2020

No	Jenis Pelanggaran	Tahun	
		2019	2020
1	Kelebihan Muatan tidak membayar retribusi	89	98

¹⁰⁴Wawancara dengan Staff Angkutan Barang (Anonim) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Pada Tanggal 02 Maret 2021.

2	Persyaratan Teknis Tidak Layak Jalan	2	2
3	Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji	15	14
4	Izin Trayek	4	3
Jumlah		110	117

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 2020

Dari tabel 3.1 di atas, diketahui terdapat 5 jenis pelanggaran lalu lintas pada kendaraan tonase berat (truk) dengan jenis pelanggaran meliputi pelanggaran rambu lalu lintas, persyaratan teknis layak jalan, tidak memiliki bukti lulus uji kendaraan, izin usaha angkutan, izin trayek kendaraan yang menyalahi aturan, dan muatan lebih tidak membayar retribusi. Berdasarkan observasi lapangan, bahwa hampir setiap hari terjadinya penyalahgunaan jalan, terutama pada waktu sore hari dengan lintasan yang tidak dilewati kendaraan muatan (maksimal 5 tonase), dan lintasan jalan tersebut dilalui oleh kendaraan bertonase dengan muatan muatan diatas 8 ton pada jalan lintas Provinsi Lampung yang dilalui pada waktu yang dilarang (hanya boleh dilewati pukul 21.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB).

Berdasarkan data empiris pada tabel di atas dan observasi penelitian dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengawasan kendaraan muatan lebih atau bertonase besar (truk) di jalan lintas Provinsi Lampung, antara lain:

- a. Masih ditemukannya truk yang melanggar kewajiban penggunaan izin jalan atau truk kelebihan muatan (tabel 1)
- b. Adanya truk bertonase berat yang melintas di jalan umum pada waktu yang dilarang untuk melakukan lintasan (pukul 21.00 wib s/d 06.00 wib).
- c. Belum berjalannya koordinasi dan optimalnya pengawasan di posko pengawasan dilakukan antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Satlantas, dimana pos sementara pengaturan jalan milik Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sering ditemukan tidak ada personel maupun Satuan Polisi Lalu Lintas

Pelanggaran peraturan penggunaan jalan atau ketentuan yang ditetapkan, maka apabila terjadi penyimpangan/ pelanggaran dapat dikenakan sanksi ditempat berupa pembongkaran muatan dan sanksi administrasi berupa pencabutan izin perusahaan, pencabutan izin operasi dan/atau izin trayek serta rekomendasi pencabutan izin usaha. Berdasarkan data jenis pelanggaran kendaraan truk bertonase berat, maka terdapat beberapa jenis pelanggaran yang terdata, antara lain, meliputi kelebihan muatan, persyaratan teknis layak jalan, tidak memiliki bukti lulus uji, izin usaha angkutan, dan izin trayek.¹⁰⁵

Tabel 3.2

Jenis Pelanggaran dan Sanksi Kendaraan Truk Bertonase Berat, 2020

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Jenis Sanksi
1	Kelebihan Muatan tidak	98	Denda dan Penangguhan operasional jalan

¹⁰⁵Wawancara dengan Viky Amalia Staff Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Pada Tanggal 02 Maret 2021.

	membayar retribusi		
2	Tidak Layak Jalan	2	Penanguhan operasional jalan
3	Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji	14	Penanguhan operasional jalan
4	Izin Trayek	3	Penanguhan operasional jalan
Jumlah		17	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 2020

Dari tabel 3.2 diatas diketahui setiap kendaraan yang terjaring dan melakukan pelanggaran hanya dikenakan sanksi berupa; Selain wajib bayar retribusi ada denda maksimal Rp. 500 ribu bagi pelanggaran kendaraan truk melebihi muatan kendaraan tidak membayar retribusi, dan penanguhan operasional jalan/kendaraan tidak dapat melakukan operasional di jalan selama ketentuan dan persyaratan belum terpenuhi oleh pemilik kendaraan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Retribusi Perizinan Jalan

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisa faktor pendukung dan penghambat kebijakan retribusi perizinan jalan di Provinsi Lampung menggunakan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual. Keberhasilan dan kegagalan kebijakan retribusi parkir akan diselaraskan dalam pendekatan tersebut berdasarkan literatur administrasi publik.¹⁰⁶

a) Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah kondisi yang dapat mendorong kinerja kebijakan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal. Faktor pendorong penyelenggaraan retribusi perizinan jalan di Provinsi Lampung didukung oleh sarana dan prasarana serta koordinasi Dinas Perhubungan yang telah terlaksana dengan baik.

- 1) Sarana dan Prasarana Pengawasan Pelaksanaan pengawasan tidak akan berjalan optimal tanpa didukung dengan ketersediaan sarana maupun prasarana pengawasan kendaraan bermuatan lebih di jalan umum, sehingga keidealan personil dan fasilitas pendukungnya dengan beban pengawasan yang ada menjadi salah satu ukuran penting yang dilakukan selama ini.
- 2) Koordinasi yang dilakukan antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan instansi terkait yang membidangi lalu lintas angkutan jalan atau Satlantas dilakukan ketika akan operasi razia kendaraan angkutan barang. Pengawasan dengan upaya membentuk tim terpadu hanya dilaksanakan pada waktu tertentu atau dengan kata lain pelaksanaan pengawasan pelanggaran pengguna kendaraan bermuatan lebih yang dilaksanakan melalui fungsi koordinasi antar instansi dibidang lalu

¹⁰⁶Mathis Robert, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta : Salemba empat, 2002), 12.

lintas jalan (tim terpadu) belum terlaksana dengan optimal di jalan umum Provinsi Lampung. Koordinasi dilakukan antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan instansi terkait yang membidangi lalu lintas angkutan jalan/Satlantas dilakukan pada saat adanya operasi khusus/razia kendaraan angkutan dengan jadwal yang bersifat insidentil (mendadak) dan tidak dapat dipastikan. Selain operasi khusus/razia tidak terdapat bentuk koordinasi yang terikat, dimana sifat koordinasi hanya didasarkan pada kesadaran petugas dilapangan dari instansi terkait tersebut.

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah menjadi tidak berkembang dan menghambat tujuan kebijakan. Keberhasilan kebijakan menurut Ripley akan dapat berjalan apabila aktor bawahan dalam hal ini juru parkir dan masyarakat memusatkan perhatian terhadap aktor atasan¹⁰⁷ (Dinas Perhubungan). Namun, berdasarkan penelitian di lapangan perilaku aktor bawahan masih banyak melakukan ketidakpatuhan. Oleh karena itu peneliti mengkategorikan temuan ini pada faktor penghambat. Adapun faktor penghambat di lapangan seperti: Pengawasan Dinas Perhubungan belum optimal, dan Lemahnya penerapan sanksi hukum.

- 1) Kemampuan Pelaksana Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan dilapangan belum memiliki jumlah petugas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang belum memadai dengan kebutuhan rute jalan yang menjadi target pengawasan. Selain itu, kualitas petugas jaga pada pos pengawasan belum melaksanakan pengawasan secara optimal, dimana masih ditemukan pos pengawasan yang

¹⁰⁷Haedar Akib & Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, (Jurnal Kebijakan Publik, 2008), 12–14.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli, *Fiqh Isyasyah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Aksara, 2003).
- Adhi, *Analisis Pengaruh Retribusi Parkir Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah* (Kota Bandar Lampung : PAD, 2012).
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Ciptaguna, 2004).
- Aziz Fahrurrozi & Erta Mahyudin, *Fiqh Manajerial*, Al-Mawardi, (Jakarta Selatan: Gramedia, 2010),
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Damas Dwi Anggoro, *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Malang: Ub Press, 2017).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Grafindo Persada, 2002).
- Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

- Djaka, *kamus lengkap bahasa indonesia*, (Surakarta: Pustaka Mandiri 2006).
- Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari"ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- H. M. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Bakti, 2004).
- Imam Amrusi Jalani, *Hukun Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011).
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000).
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012)
- Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja 2015).
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Mathis Robert, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Salemba empat, 2002).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017).
- Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Mustafa Edwin Nasution, *Budi setyanto dan Nurul huda, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* , (Jakarta: kencana,2007).
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja

Rosdakarya: 2013).

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

S.Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia, 1994).

Soeranto Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2011).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).

Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2003).

TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013).

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009).

UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

Pasal 1 (Ayat 2), Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 11 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No 38 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

AL-QUR'AN

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an 20 Baris Terjemah Dua Muka, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011).

HADIST

Muslim, Shahih Muslim, Juz II hadits no 4828, (Lebanon: Dar Al Kutub Beirut, t.t)

JURNAL

Andalan Pelawi, 2016, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Universitas Sriwijaya Indralaya.

Haedar Akib & Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, (Jurnal Kebijakan Publik, 2008).

Irfan Saputra, 2017, Efektivitas Pengawasan Pengangkutan Barang, Universitas Lampung

Roy Andalan Pelawi, 2016, Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Universitas Sriwijaya Palembang.

Sri Tiya Dewi A, 2016, Kebijakan Perizinan Angkutan Besar Melintas Jalan Kota Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Suci indrawati, 2017. Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin Makasar.

INTERNET

Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses dari

<https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>.

<http://basarta.co.id/bisnis-jasa-angkutan-truk/>.

<https://www.lampost.co/berita-tak-miliki-perda-pengawasan-angkutan-batu-bara-penyebab-jalan-sering-rusak.html>.

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Tersedia Online : <http://hubdat.dephub.go.id>.

